

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN DI KABUPATEN SUMBAWA

Muh. Nurqaim
muhnurqaim24@gmail.com
Universitas PGRI Semarang

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the results of the analysis of local government policies on the guidance and development of physical education, sports and health teachers in elementary and junior high schools in Sumbawa Regency. This research uses an integrative qualitative approach. The method used is interview, observation and documentation. The subject of this research is the government instanti, the education and culture office of Sumbawa Regency, the data is analyzed by collecting data, presenting data, reducing data and drawing conclusions. The results of this study explain that the policy is regulated and formed by the Department of Education and Culture through the KKG forum and the MGMP forum as evidenced by the documentation archive of Teacher Guidance and Development Activities obtained through the KKG and MGMP forums for Physical Education and Health in Sumbawa Regency with the implementation of this policy generally carried out by the education office. and culture and specifically by the GTK development sector, the supporting factors for this policy are support from the council or members of the DPRD and the local government related to prioritizing education in Sumbawa Regency which is stated in Perbup No. In implementing the policy, it was concluded that at the elementary school level as well as at the junior secondary level, the availability of educators from the physical education department was still lacking. The conclusions of this study indicate that policies related to the guidance and development of physical education, sports and health teachers have been implemented, but this form of policy is new in general, not specifically for elementary and junior high school teachers in Sumbawa Regency.

Keywords: *Government Policy, Guidance and Development, Physical Education Teacher.*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil analisis kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru penjasorkes SD dan SMP di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif integratif. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek penelitian ini adalah instansi pemerintah, dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sumbawa, data dianalisis dengan cara mengumpulkan data, menyajikan data, mereduksi data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa kebijakan diatur dan dibentuk oleh dikbud melalui forum KKG dan forum MGMP yang dibuktikan dengan arsip dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan guru yang didapatkan melalui forum KKG dan MGMP penjasorkes Kabupaten Sumbawa dengan implementasinya kebijakan ini secara umum dilakukan oleh dinas dikbud dan secara khusus oleh bidang pembinaan GTK, adapun faktor pendukung dari kebijakan tersebut adalah dukungan dari dewan atau anggota DPRD serta pemda terkait dengan memprioritaskan pendidikan di Kabupaten Sumbawa yang tertuang pada Perbup No.33 Tahun 2021 tentang pendidikan karakter sedangkan faktor pemnghambat terdapat pada saat implementasi kebijakan, disimpulkan bahwa di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat menengah pertama ketersediaan tenaga pendidik yang berasal dari jurusan pendidikan jasmani masih mengalami kekurangan. Simpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait pembinaan dan pengembangan guru penjasorkes ini sudah dilaksanakan namun bentuk kebijakan ini baru secara umum belum secara khusus untuk guru PJOK SD dan SMP di Kabupaten Sumbawa.

Kata Kunci: *Kebijakan Pemerintah, Pembinaan dan Pengembangan, Guru penjasorkes.*

PENDAHULUAN

Kebijakan adalah bentuk aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari suatu keputusan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu yang ada dan berkembang di lembaga-lembaga atau dalam masyarakat. Kebijakan juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pemilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Menurut (Affrian, 2012) “kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.” Fungsi pemerintah dalam kajian ini merupakan sebagai penanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan kebijakan terhadap pelaksanaan pembinaan serta pelaksanaan pengembangan guru penjasorkes untuk memajukan kesejahteraan pendidikan dan merupakan satu bentuk tujuan nasional yang perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita dan harapan bangsa dan negara Indonesia.

Desentralisasi kekuatan dalam bentuk kebijakan yang di amanatkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk bisa melaksanakan berbagai hal yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah di daerah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Kebijakan dijelaskan (Michael, 2017) “pada prinsip dasar kebijakan publik itu meliputi apapun yang dipilih atau tidak dipilih oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Sehubungan dengan hal tersebut, aparatur pemerintah daerah sebagai perencana dan pelaksana suatu model kebijakan pelayanan publik, diharapkan mampu memberikan bentuk-bentuk peningkatan pelayanan terkait dengan pelaksanaan pembinaan serta pelaksanaan pengembangan guru penjasorkes.

Pemerintah daerah di Kabupaten Sumbawa mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan guru olahraga atau guru penjasorkes sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Maka salah satu tugas pemerintah daerah adalah mengutamakan pada proses pembinaan dan pengembangan tenaga kepelatihan terhadap guru secara umum dan secara khusus guru penjasorkes. Guru penjasorkes ini ialah tenaga yang senantiasa diutamakan serta dituntut buat berfungsi aktif dalam meningkatkan proses kemajuan pembelajaran terkhusus dalam proses keolahragaan di kabupaten Sumbawa, sehingga berbanding terbalik dalam proses perlakuan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menentukan keahlian ataupun legalitas yang dimiliki oleh guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dilihat dari hasil UKG kabupaten sumbawa tahun 2019 yang masih banyak di

bawah rata-rata yaitu 218 guru SD hanya mendapatkan nilai rata-rata 51,56 dan 40 guru SMP dengan nilai rata-rata 54,66 dimana standar nilai yaitu 8,0. Pada intinya, kegiatan UKG ini merupakan bentuk atau cara pemerintah dalam menghasilkan tenaga kependidikan yang benar-benar kompeten dalam pelaksanaannya. Maka, perlu diketahui Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan pengembangan guru penjasorkes Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumbawa?, Bagaimana implementasi, faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pembinaan dan pengembangan guru penjasorkes Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama di Kabupaten Sumbawa?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif integratif artinya pendekatan yang memiliki tujuan untuk menggambarkan atau menguraikan keadaan serta fenomena yang sebenarnya atau pelaksanaan penelitian untuk memahami dan mengetahui masalah analisis kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangam guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan berdasarkan pada bentukan yang kompleks, disusun dengan kata-kata, atau melaporkan pandangan detail pada latar alamiah atau natural. Model integratif adalah model komprehensif yang memperhitungkan konsekuensi potensial dari suatu kebijakan baik sebelum diimplementasikan maupun setelah diterapkan. Jenis model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan integrasi teknik peramalan dan evaluasi untuk menghasilkan gambaran masa depan yang lebih akurat. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2010) yang mengatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen”. Pendekatan ini menguraikan tentang analisis kebijakan pemerintah daerah terhadap proses pembinaan dan pengembangan guru penjasorkes Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumbawa.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari data yang diperoleh. Sumber data ialah keterangan atau informasi yang didapatkan dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari subjek atau pemberi informasi utama atau yang disebut dengan narasumber. sumber data primer pada penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara yang mendalam serta dokumentasi. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sumbawa, kepala bidang pembinaan guru dan

tenaga kerja kepala bagian bidang pembinaan Sekolah Dasar, kepala bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama, ketua KKG penjasorkes Sekolah Dasar dan Ketua MGMP penjasorkes Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumbawa.

Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan merekam peristiwa, isu informasi, karakteristik dan semua elemen yang akan mendukung dan mendukung penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, berdasarkan metode yang dikenal dengan teknik dan alat pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi (observasi), wawancara (*in-depth interview*), dan dokumentasi.

Keabsahan Data dalam penelitian ini dikuatkan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode verifikasi data dengan memanfaatkan informasi lain. Teknik triangulasi yang digunakan peneliti meliputi pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber untuk menghasilkan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan mengkategorikan data dari beberapa sumber agar menghasilkan gambaran yang lebih akurat. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi tentang kebijakan pemerintah daerah yang mempengaruhi pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani dan olahraga di Kabupaten Sumbawa.

Teknik analisis yang digunakan adalah mencari dan mencatat fakta data melalui observasi, melakukan wawancara, dan mendokumentasikan berbagai kebijakan pemerintah daerah tentang pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani dan olahraga di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai selesai dengan menghasilkan sebuah data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari verifikasi dalam penelitian. Dalam pengumpulan data dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kenyataan hasil yang ada di lapangan, dimana data primer dan data skunder akan didapatkan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa kemudian data tersier atau data pelengkap didapatkan atau diperoleh melalui beberapa guru penjasorkes jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumbawa. Tahap selanjutnya adalah melakukan proses reduksi data, dimana data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber berupa catatan lapangan dibentuk hingga menjadi laporan lengkap yang sudah tersusun. Tahapan selanjutnya masuk ke penyajian data, Penyajian data dalam penelitian ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun digunakan untuk menarik kesimpulan. Penyajian data dilakukan setelah semua informasi yang didapatkan dilapangan terkumpul. Pada tahap akhir

akan dilampirkan kesimpulan dan verifikasi data. Penarikan kesimpulan merupakan data dari analisis penelitian dan kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dan temuan analisis kebijakan pemerintah daerah tentang pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sumbawa perlu diketahui implementasinya, yang menjadi dasar pemecahannya. Tahap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, yaitu: (1) Bentuk-bentuk kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan SD dan SMP, (2) Implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, (3) Faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Penyelesaian dan permasalahan berdasarkan tujuan penelitian mengenai “Analisis kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di Kabupaten Sumbawa” dibahas dalam penjelasan dibawah ini.

Beberapa hasil dari wawancara kepala dinas dikbud Kabupaten Sumbawa, kepala bidang GTK, kepala bidang pembinaan SD dan SMP serta ketua KKG penjas SD dan ketua MGMP penjas SMP maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan SD dan SMP di Kabupaten Sumbawa secara umum sesuai dengan Perda No.10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa sehingga berlandaskan perda tersebut pada tahun 2021 keluar kebijakan penguatan Pembentukan KKG penjas SD dan MGMP penjas SMP oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sumbawa yang bertujuan mengkoordinasikan kembali serta memudahkan koordinasi antar guru terkait pelaksanaan pembinaan dan pengembangan guru penjas di Kabupaten Sumbawa. Bentuk kebijakan ini belum memenuhi kebijakan secara khusus yang menangani tentang pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sehingga pemerintah daerah harus membuat kebijakan atau peraturan secara khusus (PERDA) terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan SD dan SMP di Kabupaten Sumbawa.

Hasil dari wawancara, maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan SD di Kabupaten Sumbawa adalah secara umum dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan secara teknis dilakukan oleh Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kabupaten Sumbawa serta pengawas olahraga. Dalam proses implementasi kegiatan pembinaan dan pengembangan guru penjas ini sudah dilaksanakan kembali mulai tahun 2021 sejak terbitnya surat keputusan dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan tentang pembentukan penguatan KKG penjas SD dan MGMP penjas SMP dimana proses pembinaan dan pengembangan dilaksanakan dua kali dalam sebulan untuk KKG penjas SD dan pembinaan dan pengembangan guru penjas SMP yaitu pada minggu kedua dalam satu bulan dan dibina oleh tenaga ahli dan pengawas olahraga.

Peneliti mengetahui dari hasil wawancara bahwa faktor pendukung suatu kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan SD maupun tingkat SMP yaitu adanya dukungan dari dewan atau anggota DPRD serta pemda terkait untuk memprioritaskan pendidikan di Kabupaten Sumbawa yang tertuang pada Perbup No.33 Tahun 2021 tentang pendidikan karakter sehingga dinas pendidikan dan kebudayaan secara umum mengeluarkan kebijakan pembinaan terhadap guru. Dinas pendidikan dan kebudayaan merespon dengan baik untuk memberikan tempat atau wadah yang terstruktur bagi para guru untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari guru tersebut ditambah dengan adanya ketersediaan tenaga ahli atau tenaga pengawas olahraga di lingkup Kabupaten Sumbawa sebagai pembina dan pengembang kemampuan guru penjas.

Pernyataan dan uraian yang disampaikan, maka faktor penghambat dari kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah terdapat pada saat implementasi kebijakan tersebut, disimpulkan bahwa di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat menengah pertama ketersediaan tenaga pendidik yang berasal dari jurusan pendidikan jasmani masih mengalami kekurangan dan ada beberapa guru penjas yang tidak berasal dari latar pendidikan guru penjas yang mengakibatkan proses implementasi mengenai pembinaan ilmu olahraga masih sangat kurang serta permasalahan ini menjadi faktor yang menghambat proses pembinaan dan pengembangan guru terkhusus guru penjas karena ketidak sesuaian ilmu pada saat menempuh pendidikan dengan pengabdian yang diajarkan .

Data dianalisis dengan sangat detail. Berikut kesimpulan pembahasan analisis kebijakan pemerintah daerah tentang pembinaan dan pengembangan guru penjasorkes di SD

dan SMP se-Kabupaten Sumbawa. Menurut (Nurkolis, 2017) “memberikan definisi kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman pengambilan keputusan lebih lanjut dan penerapan atau pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan.” Menurut Widodo dalam (Chanif Quntum, 2018) “suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang didalamnya terdapat pelaku-pelaku yang terlibat dalam mengatasi masalah yang timbul dari lingkungan.”

a. Bentuk-Bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu memunculkan ide-ide atau gagasan serta program gemilang dalam kebijakannya sesuai dengan visi Kabupaten Sumbawa yaitu Sumbawa Gemilang yang mengandung makna memiliki daya saing yang kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun tingkat internasional. bentuk-bentuk kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan SD dan SMP di Kabupaten Sumbawa secara umum sesuai dengan Perda No.10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa sehingga berlandaskan perda tersebut pada tahun 2021 keluar kebijakan penguatan Pembentukan KKG penjas SD dan MGMP penjas SMP oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sumbawa yang bertujuan mengkoordinasikan kembali serta memudahkan koordinasi antar guru terkait pelaksanaan pembinaan dan pengembangan guru penjas di Kabupaten Sumbawa. Bentuk kebijakan ini belum memenuhi kebijakan secara khusus yang menangani tentang pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sehingga pemerintah daerah harus membuat kebijakan atau peraturan secara khusus (PERDA) terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan SD dan SMP di Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu mengakomodasikan setiap kepentingan dan kebutuhan yang berkembang dalam meningkatkan bentuk kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan SD dan SMP di Kabupaten Sumbawa.

b. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan SD dan SMP di Kabupaten Sumbawa adalah secara umum dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan secara teknis dilakukan oleh Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kabupaten Sumbawa serta pengawas olahraga yang diwadahi dalam forum KKG dan MGMP. Dalam proses implementasi kegiatan pembinaan dan pengembangan guru penjas ini sudah dilaksanakan kembali mulai tahun 2021 sejak terbitnya surat keputusan dan arahan dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan tentang pembentukan penguatan KKG penjas SD dan MGMP penjas SMP dimana proses pembinaan dan pengembangan dilaksanakan dua kali dalam sebulan untuk KKG penjas SD dan pembinaan pengembangan guru penjas SMP yaitu pada minggu kedua dalam satu bulan serta dibina oleh tenaga ahli dan pengawas olahraga yang kemudian pelaksanaan pembinaan ini terbagi menjadi tiga zona yaitu zona timur berpusat di Kecamatan Plampang, zona tengah di Kecamatan Sumbawa dan zona barat di Kecamatan Alas Utan. Dalam proses pembahasannya yaitu membahas tentang kurikulum, bahan pembelajaran dan informasi pengembangan di pendidikan olahraga serta pembinaan dan pengembangan kualitas dari guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.

Kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang dilaksanakan oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa melalui bidang pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan (GTK) sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan akan tetapi belum begitu maksimal karena pada saat proses implementasinya masih ada permasalahan dilapangan yaitu jurusan disiplin ilmu guru di Kabupaten Sumbawa yang belum sesuai dengan bidang pengabdianya yaitu mengajar di bidang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sehingga menjadi penghambat proses implementasi, akan tetapi sesuai data dilapangan tidak dapat dipungkiri karena di Kabupaten Sumbawa masih sangat kekurangan guru baik di tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah menengah dan terkhusus guru di bidang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.

c. Faktor Pendukung Kebijakan Pemerintah

Faktor pendukung kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah adanya dukungan dari dewan atau anggota DPRD serta pemda terkait untuk memprioritaskan pendidikan di Kabupaten Sumbawa yang tertuang pada Perbup No.33 Tahun 2021 tentang pendidikan karakter sehingga dinas pendidikan dan kebudayaan secara umum mengeluarkan kebijakan pembinaan terhadap guru untuk mensukseskan perbup tersebut. Dinas pendidikan dan kebudayaan merespon dengan baik sehingga memberikan tempat atau wadah yang terstruktur bagi para guru untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari guru tersebut, ditambah dengan adanya ketersediaan tenaga ahli atau tenaga pengawas olahraga di lingkup Kabupaten Sumbawa sebagai pembina dan pengembang kemampuan guru penjas.

Kebijakan di atas, diatur oleh lembaga pemerintah yang menangani masalah pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yaitu melalui bidang pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sumbawa akan tetapi belum secara khusus dibuat kebijakannya sendiri untuk guru penjas.

d. Faktor Penghambat Kebijakan Pemerintah

Faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah terdapat pada saat implementasi kebijakan tersebut, disimpulkan bahwa di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat menengah pertama ketersediaan tenaga pendidik yang berasal dari jurusan pendidikan jasmani masih mengalami kekurangan dan ada beberapa guru penjas yang tidak berasal dari latar pendidikan guru penjas yang mengakibatkan proses implementasi mengenai pembinaan ilmu olahraga masih sangat kurang serta permasalahan ini menjadi faktor yang menghambat proses pembinaan dan pengembangan guru terkhusus guru penjas karena ketidaksesuaian ilmu pada saat menempuh pendidikan dengan pengabdian yang diajarkan.

Temuan lainnya adalah beberapa sekolah baik tingkat SD maupun SMP di Kabupaten Sumbawa terletak lumayan jauh dari pusat zona pembagian wilayah untuk melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sehingga seringkali guru penjas ini tidak datang sesuai dengan jadwal

karena sulitnya akses keberangkatan dari lokasi tempat tinggal dengan sekolah tempat pembinaan dan pengembangan dilaksanakan.

e. **Tanggapan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah**

Kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan harus dibuat dan diatur dalam kebijakan pemerintah secara tersendiri atau secara khusus dan diprogramkan secara teknis setiap tahunnya oleh Bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan (GTK) dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sumbawa. Karena kebijakan pemerintah Kabupaten Sumbawa secara teknis dilakukan oleh bidang GTK melalui mekanisme dan proses pengusulan atau pengajuan melalui program, kemudian diajukan kepada pemerintah daerah melalui sekretaris daerah Kabupaten Sumbawa. Dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa baru berbentuk kebijakan secara umum yaitu pembentukan MGMP dan KKG guru se- Kabupaten Sumbawa dimana kebijakan ini merupakan kebijakan umum di bidang pendidikan untuk mengatur atau mewadahi guru sebagai ujung tombak pendidikan di Indonesia. Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Sumbawa selama periode pemerintahan tahun 2022 belum pernah mengeluarkan atau mengusulkan kebijakan khusus dalam bentuk perda untuk guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan baik di tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah menengah pertama yang merupakan domain intansi kepengurusannya di tingkat Kabupaten. Pentingnya pembinaan dan pengembangan guru di Kabupaten Sumbawa terkhusus guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang merupakan garda terdepan membimbing dan membina para siswa dalam bidang olahraga di tingkat sekolah merupakan hal yang perlu dan harus diberikan pembinaan dan pengembangan yang khusus dan mengingat kabupaten Sumbawa juga merupakan kabupaten dengan antusias masyarakatnya terhadap olahraga sangat tinggi dilihat dari event olahraga setiap tahunnya yang didominasi oleh para pelajar baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

SIMPULAN DAN SARAN

a. **Simpulan**

Bentuk kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di Kabupaten Sumbawa yaitu pembentukan penguatan KKG dan MGMP akan tetapi kebijakan ini baru secara umum belum secara khusus untuk guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan baik di tingkat SD maupun SMP di kabupaten Sumbawa. Kebijakan ini lahir berlandaskan adanya Perda No. 33 Tahun 2021 tentang pendidikan karakter di Kabupaten Sumbawa.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan secara umum oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa dan secara teknis Bidang Pembinaan Tenaga Guru dan Kependidikan (GTK) melalui forum KKG di tingkat SD dan forum MGMP di tingkat SMP akan tetapi belum bisa di implementasikan secara maksimal karena di Kabupaten Sumbawa baik tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah menengah masih mengalami kekurangan guru dan terkhusus guru penjas.

Faktor pendukung kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah adanya dukungan dari dewan atau anggota DPRD serta pemda terkait dengan memprioritaskan pendidikan di Kabupaten Sumbawa yang tertuang pada Perbup No.33 Tahun 2021 tentang pendidikan karakter sehingga dinas pendidikan dan kebudayaan secara umum. mengeluarkan kebijakan pembinaan terhadap guru. Dinas pendidikan dan kebudayaan memberikan tempat atau wadah yang terstruktur bagi para guru untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari guru tersebut ditambah dengan adanya ketersediaan tenaga ahli atau tenaga pengawas olahraga di lingkup Kabupaten Sumbawa sebagai pembina dan pengembang kemampuan guru penjas.

Faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah terdapat pada saat implementasi kebijakan tersebut, disimpulkan bahwa di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat menengah pertama ketersediaan tenaga pendidik yang berasal dari jurusan pendidikan jasmani masih mengalami kekurangan dan ada beberapa guru penjas yang tidak berasal dari latar pendidikan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Temuan lainnya adalah beberapa sekolah baik tingkat SD maupun SMP di Kabupaten Sumbawa terletak lumayan jauh dari pusat zona pembagian wilayah untuk melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sehingga seringkali guru penjasorkes ini tidak datang sesuai dengan

jadwal karena sulitnya akses keberangkatan dari lokasi tempat tinggal dengan sekolah tempat pembinaan dan pengembangan dilaksanakan.

b. Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa hendaknya membuat peraturan daerah (PERDA) yang mengatur kebijakan tentang pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Peraturan daerah sangat penting dalam mempermudah peningkatan pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di Kabupaten Sumbawa.

Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa untuk mengutamakan kebijakan yang berkaitan dengan program pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sehingga dalam meningkatkan kompetensi guru dapat berjalan dengan sebaik-baiknya di Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (n.d.). *Kebijakan Publik by Eko Handoyo* (z-.
- Brawijaya, U., Administrasi, F. I., & Publik, J. A. (2018). *Pengaruh kebijakan aksesibilitas terhadap tingkat partisipasi politik penyandang difabel di kota batu.*
- Michael, T. (2017). Related Papers. *Over The Rim, 1*, 191–199.
<https://doi.org/10.2307/j.ctt46nrzt.12>
- Moleong Lexsy J, 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Dkk. Bandung.
- Pendidikan, M., Yuliejantiningih, Y., Pendidikan, M., & Pendidikan, M. (2017). *Efektivitas pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru.*